

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan di Negara Indonesia merupakan permasalahan sosial yang cukup kompleks, hal tersebut merupakan suatu hal yang masih relevan untuk perdebatan di sebuah forum internasional maupun nasional, walaupun kemiskinan merupakan hal yang sering muncul sejak ratusan bahkan ribuan yang lalu dan belum juga ter selesaikan sampai saat ini. Kita ketahui bahwa kemiskinan sendiri merupakan kondisi yang sering berhubungan dengan berbagai hal mengenai keadaan hidup. Kondisi kemiskinan sendiri telah berkembang secara ekonomi didalam suatu negara dan menjadi suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan kesejahteraan suatu masyarakat. Dengan demikian apabila tingkat kemiskinan dimasyarakat menurun maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu negara itu meningkat (Wiguna, 2013).

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan ini menjadi hal yang sulit untuk menghindari hal kemiskinan tersebut. Kemiskinan merupakan masalah klasik yang bisa saja berupa soal pengangguran dan ketimpangan sosial yang sangat mendasar di Negara Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya jumlah penduduk miskin yang banyak berdomisili di pedesaan. Kemiskinan disini dapat diartikan bahwa seseorang yang sulit untuk mengakses kebutuhan hidup yang

disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan yang ia peroleh (Amaliah, 2015).

Kelompok penduduk miskin yang berada di perkotaan atau perdesaan biasanya mereka berkerja menjadi buruh tani, pedagang kaki lima, pedagang kecil dan pengangguran. Karena kualitas sumber daya yang rendah dan mereka juga kurang memiliki kemampuan, tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan mencari pekerjaan susah. Pemerintah sudah bersusah payah untuk melaksanakan berbagai kebijakan-kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang berada di Indonesia ini (Saputra, 2011).

Ibnu Kathir secara detail menjelaskan bahwa miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupinya, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Ia pun diberi sesuatu yang sekiranya sedikit menutupi kebutuhan diri dan keluarganya. Mengutip hadis Ibnu Khatir yang secara eksplisit menerangkan mengenai kemiskinan.

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرْدُ هُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ  
وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يَبْغُ نِيَّهِ وَلَا يَفْطِنُ بِهِ فَيُنْصَدَّقَ عَلَيْهِ

Yang artinya:

*Bukanlah miskin orang yang keliling meminta-minta kepada manusia lalu ia ditolak dengan sesuap atau dua suap makanan dan sebutir dan dua butir kurma. Akan tetapi miskin adalah yang tidak mendapatkan kecukupan untuk mencukupinya dan tidak ada yang mengetahui kondisinya untuk memberi sedekah kepadanya.*

Penggunaan makna faqr yang dapat diidentikkan dengan kemiskinan adalah sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 268

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Yang artinya: Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

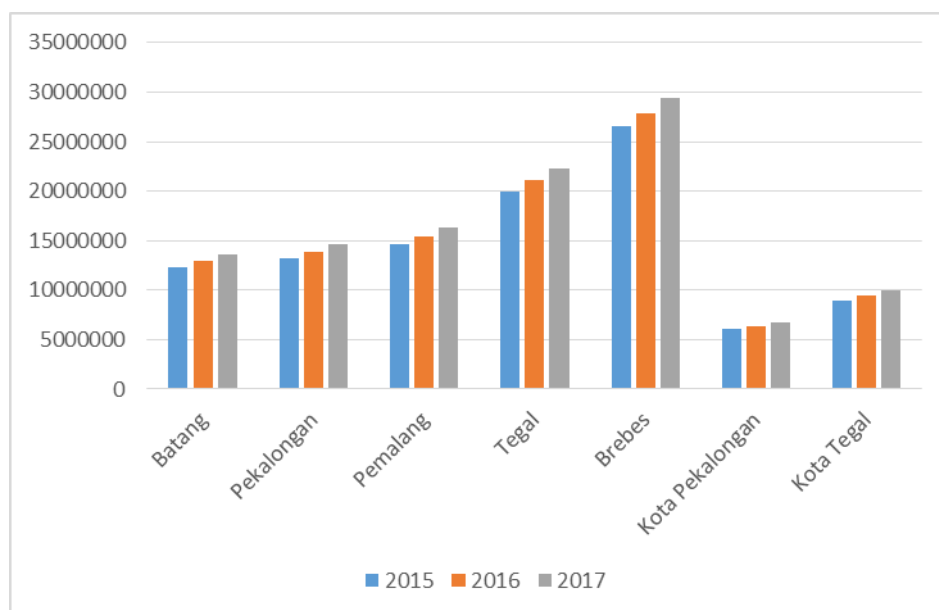
**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Eks**  
**Pekalongan (Ribuan Jiwa) Tahun 2013-2017**

Wilayah Jateng	Kemiskinan				
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan jiwa)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Batang	87.5	82.1	83.5	82.6	81.5
Pekalongan	116.5	109.3	112.1	113.3	111.6
Pemalang	246.8	237	235.5	227.1	225
Tegal	149.8	140.3	143.5	144.2	141.8
Brebes	367.9	355.1	352	348	343.5
Kota Pekalongan	24.1	23.6	24.1	23.6	22.5
Kota Tegal	21.6	20.9	20.3	20.3	20.1

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2018

Berdasarkan data dari BPS dapat dilihat pada tabel 1.1 di atas bahwa tingkat kemiskinan yang dilihat dari jumlah penduduk miskin di Eks karesidenan terendah ditempati oleh Kota Tegal pada tahun 2017, yaitu sebesar 20.1 ribuan jiwa, pada tahun-tahun sebelumnya jumlah penduduk miskin di Kota Tegal ini mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Sedangkan jumlah penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Brebes pada tahun 2013 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 367.9 ribuan jiwa, ditahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan dan kenaikan.

Dalam memahami masalah-masalah pada kemiskinan yang ada di Indonesia ini, perlu diperhatikan juga lokalitas di setiap masing-masing daerah, yaitu kemiskinan yang berada pada tingkat lokal yang sudah di tentukan oleh komunitas atau pemerintah setempat. Pembangunan struktur ekonomi yang ideal merupakan suatu mekanisme perencanaan dalam menentukan strategi agar semua keputusan yang diambil dapat berjalan tepat waktu dengan menggunakan semua sumber daya yang tersedia. Dalam keputusan ini data statistik mempunyai perencanaan yang sangat penting untuk strategi perencanaan dan hasil-hasil pembangunan yang sudah tercapai untuk menentukan kebijakan yang akan datang. Tujuan dari pembangunan ekonomi ini untuk menciptakan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi yang ada, misalnya seperti perubahan sosial, mengurangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Ekonomi daerah bekerjasama antara pemerintahan privat sektor dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada. Kemiskinan masih merupakan masalah yang dialami seluruh penjuru dunia. Masalah kemiskinan sendiri tidak hanya melibatkan Negara-negara dunia ketiga maupun Negara-negara berkembang. Hal ini karena disamping istilah kemiskinan berkaitan dengan orang yang tidak mampu membiayai hidupnya atau mencukupi hidupnya secara layak, namun juga berkaitan dengan adanya ketimpangan diantara penduduk yang berpenghasilan tinggi dengan penduduk yang berpenghasilan rendah (Hudiyanto, 2014).



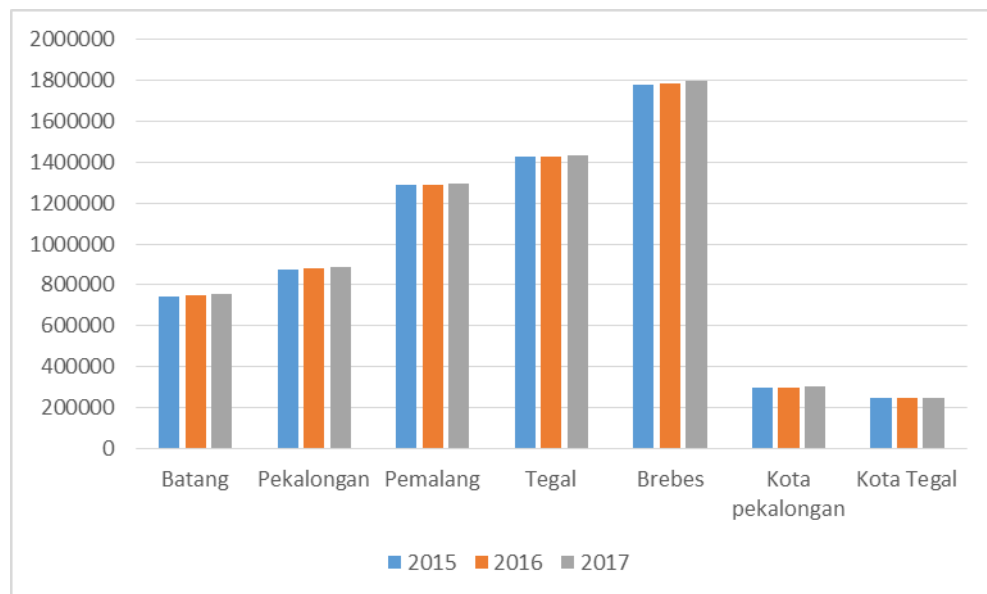
Sumber: BPS Jateng, 2018

**Gambar 1. 1 Nilai PDRB Harga Konstan di Eks karesidenan Pekalongan Tahun 2015 – 2017 (Juta)**

Berdasarkan data dari BPS dapat dilihat pada gambar di atas bahwa nilai PDRB harga konstan tertinggi di Wilayah Eks karesidenan Pekalongan berada di Kabupaten Brebes pada tahun 2017, yaitu dengan jumlah nilai PDRB sebesar Rp 29.450.229 jumlah PDRB di Kabupaten Brebes ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti pada grafik dari tahun 2015-2017 konstan mengalami peningkatan. Sedangkan nilai PDRB harga konstan terendah berada di Kota Pekalongan pada tahun 2015 dengan jumlah PDRB sebesar Rp.6.043.096. Jumlah PDRB di Kota Pekalongan ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti pada grafik dari tahun 2015-2017 konstan mengalami peningkatan. Sementara itu PDRB di 5 Kabupaten dan 2 kota pada wilayah Eks Karesidenan Pekalongan seluruhnya mengalami peningkatan yang stabil, itu menandakan bahwa PDRB di wilayah Eks

Karesidenan Pekalongan mengalami peningkatan dan menandakan semakin baiknya PDRB di wilayah tersebut.

Dengan jumlah penduduk yang besar di Provinsi Jawa Tengah juga bisa menimbulkan permasalahan yang dimana dengan jumlah penduduk yang besar maka tingkat persaingan di dunia kerja akan semakin ketat, apabila daya saing masyarakat Jawa Tengah rendah maka ini akan menjadi permasalahan sosial yang sangat berbahaya dan jika tidak diantisipasi oleh pemerintah daerah akan menimbulkan dampak yang kurang baik dimana pemupukan masyarakat akan menimbulkan gejolak ekonomi yang kurang baik kalau tidak diimbangi dengan kualitas hidup dan kesehatan yang layak (Ningtyas, 2017).



Sumber: BPS Jateng, 2018

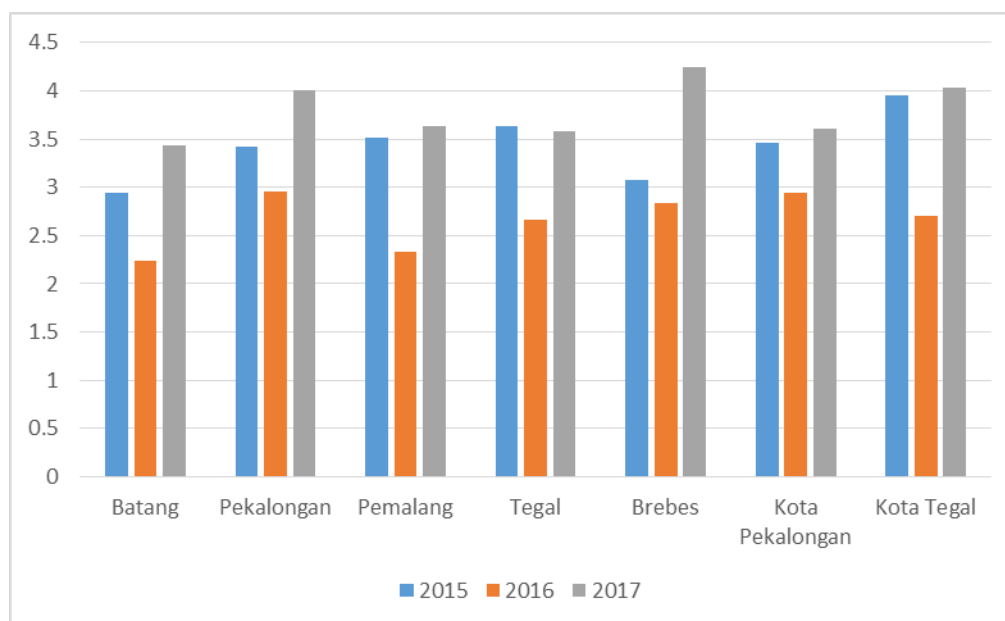
**Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk di Eks karesidenan Pekalongan Tahun 2015 – 2017 (Jiwa)**

Berdasarkan data dari BPS dapat dilihat pada gambar di atas bahwa jumlah penduduk di Eks karesidenan Pekalongan terbanyak ditempati oleh Kabupaten Brebes pada tahun 2017, yaitu dengan jumlah penduduk sebesar

1.796.004 jiwa, jumlah penduduk di Kabupaten Brebes ini mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2017 selalu mengalami peningkatan. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kota Pekalongan pada tahun 2015 dengan jumlah penduduk sebesar 296.404 jiwa, Jumlah penduduk di Kota Pekalongan ini selalu mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2017.

Inflasi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian. Inflasi yang terlalu tinggi akan mengganggu kestabilan perekonomian dan akan menurunkan nilai mata uang yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat. Inflasi merupakan salah satu faktor yang dianggap menyebabkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dapat meningkat. Dapat dikatakan demikian karena jika inflasi naik harga barang - barang umum akan merangsek naik, hal tersebut membuat masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari - harinya. Dan jika hal tersebut terjadi akan membuat masyarakat jauh dari kata sejahtera.

Inflasi dapat mengurangi pendapatan riil terutama untuk kelompok masyarakat yang mempunyai pendapatan tetap. Selama dalam keadaan inflasi, orang-orang dalam kelompok berpendapatan tetap akan mengalami kesulitan, karena harga beberapa barang dan jasa naik lebih cepat dari upah nominal. Kelompok berpendapatan tetap akan tetap merasakan dampak inflasi, karena upah mereka tetap tetapi harga komoditas terus naik (Oye, 2012).



Sumber: BPS 2018.

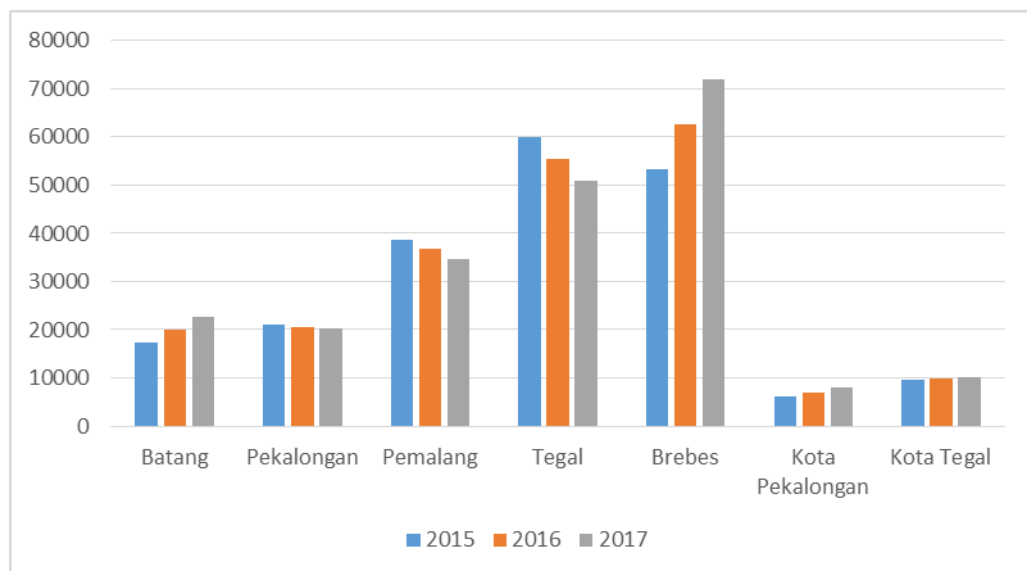
**Gambar 1. 3 Inflasi di Eks karesidenan Pekalongan Tahun 2015 – 2017 (Rupiah)**

Berdasarkan data dari BPS dapat dilihat pada gambar di atas bahwa perkembangan Inflasi pada setiap kabupaten di Eks karesidenan Pekalongan mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Inflasi tertinggi pada tahun 2017 berada di Kabupaten Brebes sebesar 4.24 persen, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Batang sebesar 2.24 persen pada tahun 2016.

Bukan hanya faktor PDRB, Jumlah Penduduk, dan Inflasi saja yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan adalah pengangguran. (Lewis dalam Sukirno, 2006) dijelaskan bahwa tujuan dari proses pembangunan khusus ditujukan bagi negara yang menghadapi masalah kelebihan tenaga kerja. Lewis menganggap di negara berkembang terdapat tenaga kerja yang berlebih, tetapi memiliki masalah kekurangan modal dan keluasaan tanah yang terbatas.



Pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan. Baik negara berkembang maupun negara maju, pengangguran merupakan suatu keadaan yang keberadaannya tidak terelakkan. Pengangguran memiliki keterbatasan yang perlu diperhatikan sebab pengangguran sangat berpengaruh terhadap terjadinya masalah kerawanan berbagai tindak kriminal, gejala sosial, politik dan kemiskinan (Amalia, 2012)



Sumber: BPS 2018

**Gambar 1. 4 Pengangguran di Eks karesidenan Pekalongan Tahun 2015 – 2017 (Jiwa)**

Berdasarkan data dari BPS dapat dilihat pada gambar di atas bahwa perkembangan Pengangguran pada setiap kabupaten di Pekalongan mengalami kenaikan dan penurunan. Pengangguran tertinggi pada tahun 2017 berada di Kabupaten Brebes sebesar 72.051 jiwa, sedangkan yang terendah berada di Kota Pekalongan sebesar 6.131 Jiwa pada tahun 2015.

Keempat variabel di atas telah di gunakan dalam beberapa penelitian seperti halnya yang di teliti oleh Susanti (2013) yang menggunakan variabel PDRB dalam penelitiannya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat, pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat, dan IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Barat.

Dan variabel jumlah penduduk yang diteliti oleh Aisy (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh Positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat semakin tinggi jumlah penduduk di Jawa Barat maka menyebabkan meningkatnya penduduk miskin, pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, kesehatan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dan produk domestik regional bruto memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap Provinsi Jawa Barat.

Dan variabel Inflasi yang diteliti oleh Novianto (2018) menunjukan Inflasi mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah, semakin inflasi naik maka akan menyebabkan tingkat kemiskinan semakin turun. Untuk variabel pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan Jawa Tengah, IPM mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah

Serta variabel Pengangguran yang diteliti oleh Wijayanto (2010) hasil penelitian menunjukkan Pengangguran mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota/kabupaten Jawa Tengah semakin banyak orang atau masyarakat menganggur maka kemiskinan akan semakin meningkat. Variabel PDRB mempunyai pengaruh negative namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur, Pendidikan mempunyai pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Pekalongan Periode 2011-2017)”.

## **B. Batasan Masalah**

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi, yaitu membahas mengenai variabel-variabel yang menjadi objek penelitian dan instrument penelitian antara lain Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah penduduk, Inflasi, Pengangguran dalam penelitian ini yang digunakan adalah data di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011-2017.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas di atas, dalam penelitian ini akan ada beberapa konteks pembahasan guna memfokuskan masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2011-2017?

2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2011-2017?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2011-2017?
4. Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2011-2017?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2011 – 2017
2. Menganalisis bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2011– 2017
3. Menganalisis bagaimana pengaruh Inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2011 – 2017
4. Menganalisis bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2011-2017

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Ilmiah**

- a. Bagi penulis, penelitian ini sebagai media untuk mengembangkan diri dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini akan menambah wawasan untuk para akademisi dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Pekalongan dan dapat memberikan tambahan referensi dan acuan bagi mahasiswa sebagai bahan penelitian selanjutnya yang sejenis.

## **2. Manfaat Praktik**

- a. Bagi masyarakat/pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, referensi bagi pembaca untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.
- b. Bagi pengambil kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi baru bagi para pengambil kebijakan dalam memahami masalah, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu dan menjadi solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada.